



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDY FAHRIAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 713061

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.290.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , Rp. 1.210.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 428 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , Rp. 1.510.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	325.000.000
1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOBIL, HONDA MINI BUS PENUMPANG Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	275.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	625.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.515.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.515.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.